

Peningkatan Daya Saing UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha: Studi Kasus pada Pelaku Usaha Kerupuk Samiler

Harun Alrasyid¹, Fitria Alhamid Maba², Mochamad Hesya Rafli Maulana³

^{1,2,3} Universitas Islam Malang

¹ harunalrasyid@unisma.ac.id, ² 21901083035@unisma.ac.id, ³ 22001011259@unisma.ac.id

ABSTRAK

Hingga saat ini, peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak bisa diabaikan dalam perekonomian. Para pelaku UMKM dituntut untuk dapat bersaing di tengah pasar yang semakin bebas. Salah satu syarat penting untuk dapat bersaing di pasar bebas ini adalah memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, banyak pelaku UMKM yang masih kurang memahami proses pengurusan legalitas usaha, seperti yang dialami oleh pelaku UMKM Kerupuk Samiler. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk membantu pelaku UMKM memahami dan mendapatkan bantuan dalam proses pembuatan NPWP dan NIB sebagai dasar legalitas usaha. Metode yang digunakan adalah observasi, dengan mengunjungi UMKM yang menjadi binaan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM secara langsung. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah UMKM Kerupuk Samiler di Dusun Pohkecek telah berhasil memperoleh legalitas hukum yang sah berupa NPWP dan NIB.

Kata Kunci: Legalitas usaha; Nomor Pokok Wajib Pajak; Nomor Induk Berusaha; UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam sektor ekonomi yang muncul dari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai "perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau sekelompok kecil individu dengan tingkat kekayaan dan pendapatan tertentu" (Sanjaya, 2021). Sektor UMKM telah terbukti memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat dengan menggalakkan

pemberdayaan sumber daya manusia untuk menciptakan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Aulami & Ariani, 2022). Kehadiran UMKM memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam perekonomian Indonesia, sementara juga mampu mempertahankan dan mengembangkan elemen-elemen tradisi dan budaya melalui kreativitas para pelaku usaha (Ridho, 2023).

Ketika seseorang memulai bisnis dan mulai memperoleh keuntungan dari aktivitas bisnis mereka, mereka memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Hanya para wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan regulasi perpajakan yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri (Lende et al., 2021). Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada kas negara sesuai dengan hukum (dapat dipaksakan) tanpa adanya balasan langsung (kontraprestasi) yang bisa diidentifikasi secara langsung, yang kemudian digunakan untuk mendanai pengeluaran publik (Resmi, 2019).

Hal. 2

Pengetahuan mengenai berbagai kewajiban pajak sering menjadi masalah bagi banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beberapa masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM meliputi (1) kurangnya pengetahuan mengenai persyaratan dan prosedur pembuatan NPWP, dan (2) kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta manfaat dari memiliki NPWP.

Beberapa penelitian telah mengulas mengenai pemahaman kewajiban perpajakan, menunjukkan bahwa hal ini memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam membayar pajak. Fitria & Supriyono (2019) menemukan bahwa pemahaman UMKM terhadap peraturan perpajakan berhubungan positif dengan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hasil serupa juga diungkapkan oleh Mustofa, Kertahadi & R Maulinarhadi (2016), yang menemukan bahwa pemahaman secara parsial terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, penelitian Putri, Saerang, dan Budiarmo (2019) menunjukkan bahwa meskipun tingkat pemahaman wajib pajak UMKM di Kota Tomohon cukup baik, namun kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak masih rendah, yang berbanding terbalik dengan kemauan untuk mematuhi pajak. Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak UMKM dapat berperan penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka. Namun, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tersebut, bimbingan dan informasi perpajakan tambahan masih dibutuhkan oleh UMKM.

Selain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penting bagi pelaku usaha untuk mengurus legalitas perusahaan dengan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan bukti legalitas usaha yang mencatat identitas pelaku usaha, baik itu usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah proses pendaftaran secara daring. Fungsi utama NIB adalah sebagai identitas resmi perusahaan, namun juga

berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabebean, terutama jika usaha melibatkan kegiatan ekspor atau impor barang (Yeni & Yanti, 2021). Dengan adanya kemajuan teknologi dan penerbitan NPWP dan NIB yang kini dapat dilakukan secara online, penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Sukolilo untuk mendapatkan pendampingan dalam urusan legalitas usaha agar mereka dapat menggunakan fasilitas tersebut secara optimal dan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Pendampingan legalitas usaha bukan sekadar proses administratif, tetapi juga penting untuk memastikan keberlangsungan operasional UMKM, terutama di tingkat lokal seperti Dusun Pohkecik. Dalam konteks ini, pendampingan legalitas usaha dilakukan pada pelaku UMKM kerupuk samiler di Dusun Pohkecik. Proses pendampingan ini tidak hanya melibatkan aspek administratif formal, tetapi juga memberikan dukungan praktis dan bimbingan langsung pada UMKM kerupuk samiler di Dusun Pohkecik.

Melalui pendampingan ini, diharapkan pelaku UMKM berusaha dapat memahami pentingnya legalitas usaha serta mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi. Dengan demikian, UMKM kerupuk samiler di Dusun Pohkecik diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi ekonomi lokal. Tulisan ini akan menguraikan secara rinci bagaimana pendampingan legalitas usaha dilakukan pada pelaku UMKM kerupuk samiler di Dusun Pohkecik, termasuk langkah-langkah konkret yang diambil, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya bagi usaha kerupuk samiler dan ekosistem ekonomi lokal secara lebih luas.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diterapkan dengan menggunakan metode observasi, dimana fokusnya adalah untuk mengidentifikasi lokasi dan memilih Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sesuai dengan program Kandidiat Sarjana Mengabdikan (KSM) Tematik. Populasi yang menjadi fokus dalam kegiatan ini adalah UMKM Kerupuk Samiler yang berlokasi di Dusun Pohkecik. Observasi dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke UMKM tersebut untuk mengetahui secara detail permasalahan apa saja yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Metode observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif, yang mana peneliti turut terlibat secara aktif dalam mengamati dan memahami proses serta dinamika yang terjadi dalam UMKM tersebut. Melalui kegiatan observasi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha serta mendapatkan wawasan yang lebih baik mengenai proses dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM secara umum.



Gambar 1. Observasi

Tahapan berikutnya adalah upaya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, yang dilakukan melalui proses wawancara dengan para pelaku UMKM. Wawancara merupakan metode pengumpulan data di mana terjadi interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang relevan. Kelompok 33 KSM Tematik menggunakan wawancara sebagai sarana untuk menggali informasi tentang produk-produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM.



Gambar 2. Wawancara

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM sering menghadapi hambatan jika tidak memiliki izin yang memadai, seperti legalitas usaha yang sesuai dengan produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, menjalankan proses perizinan yang memadai menjadi krusial untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap UMKM tersebut. Di UMKM kerupuk samiler di Dusun Pohkecik, legalitas usaha diperoleh melalui penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

NPWP merupakan sebuah identitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas resmi dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya (Mintje, 2016). Setiap wajib pajak hanya memiliki satu NPWP yang diberikan sebagai tanda pengenal diri. Sedangkan NIB, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 pasal 25 ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, adalah identitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mengoperasikan usaha sesuai dengan bidang usahanya

(Fitriana dkk, 2022). Proses pembuatan NPWP dapat dilakukan melalui situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak (<https://ereg.pajak.go.id/login>), sedangkan pembuatan NIB dilakukan melalui platform Perizinan Online Terpadu OSS (Online Single Submission).

Pendampingan dalam proses pengurusan legalitas usaha UMKM Kerupuk Samiler dimulai dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya memiliki legalitas usaha, khususnya melalui pendaftaran NPWP dan NIB. Dalam materi sosialisasi tersebut, penekanan diberikan pada penjelasan mengenai peran vital legalitas usaha dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Pendekatan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pelaku UMKM mengenai proses dan manfaat yang dapat diperoleh melalui pendaftaran NPWP dan NIB dalam pengembangan usaha mereka.

Hal. 5

Dalam kegiatan pengabdian ini, diterapkan metode ESD (Education For Sustainable Development), di mana pendampingan terhadap legalitas usaha NPWP dan NIB dilakukan dengan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan kelangsungan usaha UMKM. Materi yang disampaikan, beserta tujuannya, bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM memiliki dasar perizinan sebelum melanjutkan proses perizinan lainnya, sehingga UMKM dapat meningkatkan kualitas usahanya dan bersaing secara efektif dengan usaha lainnya.

Kegiatan pendampingan terkait legalitas usaha NPWP dan NIB diberikan kepada UMKM di Dusun Pohkecik, Desa Sukolilo melalui pengenalan dan bimbingan. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah para pelaku usaha di Dusun Pohkecik, Desa Sukolilo.

Kelompok 33 yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat merencanakan pendampingan legalitas usaha bagi UMKM (Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Induk Berusaha) dalam tiga tahap. Tahap awal melibatkan survei terhadap pelaku UMKM untuk memahami kondisi mereka. Hasil survei menunjukkan bahwa beberapa UMKM belum memiliki legalitas usaha yang diperlukan. Contohnya, ada usaha kerupuk samiler yang belum mengurus legalitasnya. Langkah awalnya adalah dengan mengunjungi pelaku UMKM tersebut untuk memahami persyaratan dan prosedur yang dibutuhkan dalam mendapatkan NPWP dan NIB.



Gambar 3. Survey UMKM



Gambar 4. Survey UMKM

Tahap kedua, memberikan penyuluhan terkait legalitas usaha serta pentingnya hal tersebut dalam menjalankan sebuah usaha (UMKM). Penyuluhan dilakukan di kediaman pelaku UMKM kerupuk samiler.

Tahap ketiga, tahapan pendaftaran legalitas usaha (NPWP dan NIB) gratis bagi pelaku usaha (PU). Tahap ini menjelaskan persyaratan dan dokumen yang harus disiapkan pelaku usaha (PU) untuk mendaftar NPWP dan NIB gratis melalui Online Single Submission dan Ereg pajak. Dan Mahasiswa KSM-T Unisma membantu mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, serta membantu mengisi formulir terkait pembuatan NPWP dan NIB.



Gambar 5. pendampingan NPWP & NIB



Gambar 6. pendampingan NPWP & NIB

Setelah dilakukannya pendampingan melalui beberapa tahapan tersebut didapatkan Hasil yang menunjukkan bahwa UMKM tersebut memahami

pentingnya legalitas usaha dan memahami prosedurnya. Melalui pendampingan, diharapkan dapat meningkatkan minat dan kepercayaan konsumen terhadap UMKM yang telah memiliki NPWP dan NIB. Dengan adanya legalitas usaha tersebut, diharapkan warga dapat lebih mudah mengurus segala urusan yang berhubungan dengan:

1. Administrasi

Ketersediaan NPWP dan NIB dapat memudahkan dalam proses administrasi, seperti pengajuan kredit bank, pembukaan rekening dana nasabah (RDN), pembukaan rekening efek, pembuatan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan permohonan pembuatan paspor.

2. Urusan Perpajakan

Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak dapat menghindari sanksi hukum yang berlaku. Ketidapatuhan terhadap kewajiban memiliki NPWP dapat mengakibatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Oleh karena itu, dengan adanya pendampingan legalitas usaha diharapkan UMKM dalam penjualan produk semakin meningkat, memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan jaminan atas keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan usaha serta memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM kerupuk samiler di Dusun Pohkecik, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di UMKM Dusun Pohkecik, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, khususnya pada usaha keripik singkong "Samiler", berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tahapan kegiatan diawali dengan penawaran pendaftaran legalitas usaha secara gratis kepada warga, meliputi pembuatan Nomor Induk Wajib Pajak

(NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi usaha UMKM setempat. Proses pendampingan dilakukan secara intensif, di mana tim pengabdian membantu pelaku UMKM mengakses layanan elektronik seperti situs <https://ereg.pajak.go.id/login> untuk NPWP dan platform Online Single Submission (OSS) di <https://oss.go.id/> untuk NIB. Pendekatan *door to door* atau kunjungan langsung ke rumah-rumah pelaku UMKM menjadi kunci keberhasilan, memastikan setiap pemilik usaha memahami prosedur dan tidak terkendala akses teknologi. Setelah proses administrasi selesai, dokumen NPWP dan NIB yang telah diterbitkan kemudian diserahkan dalam bentuk *hardfile* ke tangan pelaku UMKM sebagai bukti fisik legalitas usaha. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menyelesaikan aspek teknis perizinan, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya kepatuhan hukum dan kemudahan akses layanan digital bagi pengembangan UMKM di daerah tersebut.

Saran

Pengabdian masyarakat di UMKM Pohkecik perlu diperluas, tidak hanya pada pembuatan NPWP dan NIB. Program berkelanjutan penting untuk memastikan pelaku UMKM mandiri dalam administrasi perpajakan dan perizinan. Peningkatan literasi digital krusial, mengingat perizinan dan pelaporan berbasis online. Pelatihan berkala penggunaan platform OSS dan e-reg pajak diperlukan. Kolaborasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Koperasi dan Kantor Pelayanan Pajak, dapat dioptimalkan. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memantau perkembangan usaha dan mengidentifikasi tantangan baru. Pendekatan ini mendorong pertumbuhan UMKM secara holistik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulami, R., & Ariani, F. (2022). Aplikasi E-Marketplace Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Mobile. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 3(1), 66–72. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/informatika/article/view/1861>
- Fitria, P. N., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Ecobank: Journal of Economics and Banking*, 1 (1), 47-54
- Fitriana, N. H. I., Putri, D. R. L., Masturo, A. H., Haqiqi, A., & Jannah, N. M. (2022). Pendampingan Pengurusan NIB UMKM Batik Wiroyudhan melalui Online Single Submission di Kelurahan Kepanjenlor. *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement*, 1(2), 163-169.
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 253-266.

- Mintje, M. S. (2016). PENGARUH SIKAP, KESADARAN, DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK (UMKM) DALAM MEMILIKI (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 4(1), 1031–1043.
- Mustofa, F.A, Kertahadi, & R Maulinarhadi, M. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berada di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 8 No. 1. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.
- Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis perilaku wajib pajak UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14 (1), 130-136.
- Putra, . W. S. ., Lubis, H. W. ., & Putri, E. E. . (2022). APLIKASI MEDIA SOSIAL PADA PARTISIPASI DAKWAH ISLAM DESA SIDOREJO LANGKAT. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1942–1948. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.9400>
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi. In Salemba Empat.
- Ridho, a. (2023). Strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dalam meningkatkan ekonomi.
- Sanjaya, P. K. A., & Nuratama, I. P. (2021). Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Mengengah.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.